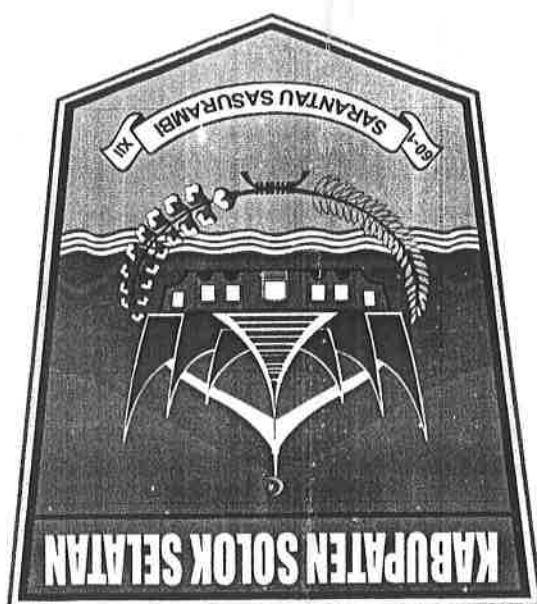


TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN



TAHUN 2020

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
RENCANA KERJA**

Jl. Poros Dua Kantor Bupati - Padang Aro Telp/Fax (0755)7575123 Kode Pos 27378



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Karunia-Nya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat menyusun " **RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020** " sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan maksud agar Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan mempunyai arah yang jelas dan memberikan batasan dasar serta etik pengelolaan APBD yang harus dipatuhi oleh pemangku kepentingan, sehingga pengelolaan tata cara penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan nilai normatif.

Rencana Kerja ini pada dasarnya merupakan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan yang proses penyusunannya melalui tahapan mendasar baik dari aspek kewilayahan maupun sektoral sebagai tindak lanjut dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, yang senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat yang menghendaki permasalahan daerah dapat ditangani secara bertahap dan berkesinambungan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri periode 2020.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 ini dapat tersusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Solok Selatan umumnya dan khususnya dalam meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan dimasa-masa yang akan datang.

Drs. PUTRA NUSA, M.Pd, MM
NIP. 196501081991031005

Padang Aro, Juni 2019
KEPALA PEJAKSANA,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian	9
Renstra OPD	9
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	15
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	18
II.4 Review Terhadap Rancangan RKPDP	19
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
DAERAH	30
BAB V PENUTUP	36
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk ketepatan Rancangan Renja OPD.

1. Melindungi masyarakat Kabupaten Solok Selatan dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
2. Membangun sistem penanganan bencana yang handal dan profesional.
3. Menyelenggarakan penanganan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, cepat, tepat, akurat, valid dan akuntabel.

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SELATAN YANG TANGGAP DAN TANGGUH DALAM MENGHADAPI BENCANA”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Solok Selatan tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi BPBD Kabupaten Solok Selatan tahun 2016 – 2021 yang dijabarkan dalam RPJMD tahun 2016-2021 yang selanjutnya diturunkan pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2021 yaitu :

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun ini menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2020. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.





Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BPRD Kabupaten Solok Selatan tahun 2020 yang telah ditetapkan, yang mengarah pada pencapaian sasaran dan Pemahaman secara dini ancaman bencana yang akan mengancam.

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat SUB Urusan Bencana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat dipropinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4736);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
- l. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan;



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
- Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran OPD untuk tahun berikutnya.
- b. Tujuan :
- Adapun tujuan dari rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah :
1. Meningkatkan upaya upaya penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Solok Selatan.
 2. Mendorong peran serta Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan upaya penanggulangan bencana.
 3. Meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap penanggulangan bencana.
 4. Meningkatkan upaya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana



1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai : Sejahtera mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKP

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditunjukkan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD



BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA OPD

Rencana Kerja BPBD Solok Selatan adalah Mengurangi Resiko Bencana Masyarakat Solok Selatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPBD Solok Selatan ini menyajikan Program Pengurangan Risiko Bencana, Penanganan Darurat Akibat Bencana, dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana Alam sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



Dalam evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan BPBD yang ada dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2019 maka dapat dilihat sebagai berikut:

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dengan capaian Renstra OPD dan RPJMD

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

B. Capaian Analisis Kinerja

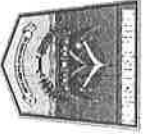




Rencana Kerja BPBD Solok Selatan 2020

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM 2016 - 2021	REUSASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-1)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja OPD Tahun n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD s/d	
					target renja OPD Tahun (n-2)	Realisasi renja OPD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d	tingkat capaian realisasi target
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya Jumlah Nagari Tangguh Bencana	39 Nagari	2 Nagari	0 Nagari	0 Nagari	0%	0 Nagari	2 Nagari	5%
	Kegiatan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana	Terbentuknya kelompok siaga bencana di masing-masing 1/ nagari	39 Nagari	21 Nagari	8 Nagari	8 Nagari	100%	8 Nagari	37 Nagari	95%
	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Siaga Bencana	Terbina kelompok siaga bencana di nagari	27 KSB	2 KSB	5 KSB	5 KSB	100%	- KSB	7 KSB	26%
	Kegiatan pelatihan team resiko cepat	Bertambahnya kuantitas dan kualitas anggota Team Resiko Cepat untuk sekolah/ kelompok masyarakat	120 Orang	10 Orang	10 Orang	- Orang	0%	- Orang	10 Orang	8%
	Kegiatan Sosialisasi bencana	Terlaksananya sosialisasi bencana ke sekolah/ kelompok masyarakat	350 orang	5000 Orang	100 orang	1700 orang	1700%	- orang	100 Orang	3548%
	Kegiatan Pembersihan dan Penuluran Hulu Sungai	Terlaksananya pembersihan hulu sungai dari lumpur pohon yang berpotensi menimbulkan bencana	6 Daerah Aliran Sungai	2 Daerah Aliran Sungai	1 Daerah Aliran Sungai	- Daerah Aliran Sungai	0%	- Daerah Aliran Sungai	2 Daerah Aliran Sungai	33%
	Kegiatan Penanaman Pohon yang mengancam fasilitas umum dan rumah penduduk	Terlaksananya penanaman pohon yang mengancam fasilitas umum dan rumah penduduk	2167 Pohon	1385 Pohon	200 Pohon	200 Pohon	3%	200 Pohon	1785 Pohon	82%
	Kegiatan Forum Pengurangan Resiko Bencana	Terbentuknya forum pengurangan resiko bencana kabupaten	1 forum PRB	- forum PRB	- forum PRB	- forum PRB	100%	- forum PRB	- forum PRB	0%
	Program peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	54%	54%	62%	100%	62%	62%	63%
	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	24 jenis peralatan	13 jenis peralatan	3 jenis peralatan	5 jenis peralatan	100%	0 jenis peralatan	18 jenis peralatan	75%
	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung kantor	100%	75%	5%	5%	100%	-%	-%	80%
	Kegiatan pemeliharaan rambu-rambu bencana	Tersedianya rambu-rambu informasi daerah rawan bencana	60 rambu rambu daerah rawan	- rambu rambu daerah rawan bencana	- rambu rambu daerah rawan	- rambu rambu daerah rawan	100%	- rambu rambu daerah rawan	- rambu rambu daerah rawan	0%



Rencana Kerja BPBD Solok Selatan 2020

	Kegiatan Pusat pengendalian operasional penanganan bencana	Tetap secara operasional Posko penanganan bencana	1 Posko	1 Posko	1 Posko	1 Posko	100%	1 Posko	1 Posko	100%
	Kegiatan penanganan bencana	Persepsi bencana yang ditangani sesuai standar kapasitas penanganan bencana	80%	80%	80%	97%	121%	80%	89%	111%
	Kegiatan pembuatan dokumen penanganan bencana	Tersedianya dokumen rencana penanganan bencana di Kabupaten Solok Selatan	11 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	- Dokumen	2 Dokumen	19%
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	persentase rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum yang di perbaiki	65%	64%	60%	60%	100%	-%	65%	65%
	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Tersedianya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	65%	65%	65%	65%	100%	-%	65%	65%



Program yang ada di RPJMD dan Renstra BPPD untuk tahun 2018 terdapat 7 target Program kegiatan yang telah di tetapkan, dan dari program tersebut semuanya terakomodir di dalam Renja. Sedangkan dalam anggaran yang di setuju atau DPA yang terakomodir sebanyak 4 program, sedangkan 3 program tidak terakomodir karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan Target 7 Kegiatan di Renstra, sedangkan direnja dan DPA sebanyak 2 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penebangan pohon yang mengancam fasilitas umum dan rumah penduduk
- Kegiatan pembentukan kelompok siaga bencana

Program Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan target di Renstra sebanyak 6 kegiatan dan terakomodir sebanyak 3 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan pembersihan hulu sungai dengan target 1 Posko dan diakomodir 1 Posko.

- Kegiatan Penanganan Bencana dianggarkan sebanyak Rp. 211.185.000,-

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Secara garis besar maka semua program yang ada dalam renstra yang diakomodir didalam RENJA dan DPA hanya 4 Program dengan kegiatan sebanyak, sedangkan kegiatan terakomodir di DPA sebanyak 20 kegiatan.

Beberapa Capaian Tahun 2018

Beberapa catatan umum capaian kinerja sepanjang tahun 2018, antara lain:

a. Dalam Pencegahan dini terhadap bencana telah dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- Penebangan pohon yang mengancam fasilitas umum dan rumah penduduk untuk 200 Pohon.
- Pembentukan kelompok siaga bencana sebanyak 8 nagari

b. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana ada beberapa kegiatan :

- Kegiatan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) yang standby 24 Jam Non Stop untuk menerima dan menyebarkan informasi bencana.
- Kegiatan Penanganan bencana, kegiatan ini untuk pelaksanaan kegiatan saat terjadi bencana.
- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan realisasi penambahan sebanyak 5 peralatan bencana.



- Yang terbagi dalam dua bidang yaitu Bidang Kedaruratan yang
- b. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang dipimpin oleh seorang Kabid
- dipimpin oleh seorang Kasi.
- a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dipimpin oleh seorang Kabid yang terbagi dalam dua bidang yaitu Bidang Pencegahan yang dipimpin oleh seorang Kasi dan Bidang Kesiapsiagaan yang
4. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Subag Umum dan Kepegawalan
 - b. Subag Keuangan
 - c. Subag Perencanaan
 3. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
 1. Unsur Pimpinan yaitu : BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah
 2. Kepala BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari
- Susunan Organisasi Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- Sampai saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Solok Selatan.
- Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD





dipimpin oleh seorang Kasi dan bidang Logistik yang dipimpin oleh seorang Kasi.

c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dipimpin oleh seorang Kabid yang mana terbagi dua bidang Bidang Rehabilitasi yang dipimpin oleh seorang Kasi dan Bidang Rekonstruksi yang dipimpin

oleh seorang Kasi.

Untuk kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Solok Selatan adalah untuk menangani terjadinya bencana supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Pelayanan di BPBD untuk tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 sudah harus melakukan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana



Rencana Kerja PPBD Solok Selatan 2020

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)	% Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah / legal	100 %
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	% jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	% Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah / legal	100 %
Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	% Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah / legal	100 %
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	% jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 %
Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	% jumlah warga negara yang ikut pelatihan	100 %
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	% jumlah warga negara yang mendapat layanan Pusedalops penanggulangan bencana dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100 %
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	% jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 %
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit / wabah zoonosis prioritas	% kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap status KLB	100 %
Respon cepat darurat bencana	% Kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %
Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	% jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100 %
Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	% jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 %
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana		



Rencana Kerja BPBD Solok Selatan 2020

Tabel II-3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Ralisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	Persentase Nagari Tangguh Bencana		100	46.15	64.10	82.05	92.3	5.12	10.25	15.38	20.51		
2	Persentase Kejadian bencana Yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas		76	72	73	74	75	80	89	90	90		



II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Adapun yang menjadi tujuan utama / tugas pokok dan fungsi dari Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana terhadap usaha penyelenggaraan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penyelenggaraan bencana berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penyelenggaraan bencana.

- e. Melaksanakan penyelenggaraan penyelenggaraan bencana pada wilayahnya.

- f. Melaporkan penyelenggaraan penyelenggaraan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah diantarnya adalah sebagai berikut:

Review Rancangan awal RKPD sebagai berikut :

- 2020.
- memadai akan diupayakan pendanaan dari Provinsi maupun APBDN untuk Tahun Rp.1.748.889.674,-. Untuk terlaksananya Kegiatan Penanggulangan yang ditetapkan sama dengan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 sebesar Namun karena kondisi keuangan daerah yang terbatas maka Renja BPBD
1. Kegiatan Pelatihan Tim Reaksi Cepat
 2. Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana
 3. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

beberapa kegiatan dibawah ini :

kegiatan yang sudah diakomodir pun sebenarnya dirasa masih kurang pada RPJMD, Renstra dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bencana. Untuk sangat dirasa masih kurang untuk menpai target yang telah ditetapkan di dalam Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan, maka anggaran yang tersediannya dengan hasil analisa kebutuhan Tahun 2020 pada Badan Penanggulangan Dari review terhadap rancangan awa RKPD Tahun 2020 bila dibandingkan

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

- a. Belum adanya gudang yang permanen, sehingga penyusunan dan pengaturan peralatan kebencanaan yang ada kurang memadai.
- b. Kurangnya SDM yang memadai dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan kebencanaan.
- c. Kurangnya anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
- d. Kurangnya dokumen-dokumen perencanaan penanggulangan bencana





Rencana Kerja BPBD Solok Selatan 2020

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting		
	Kegiatan Peningkatan Pelatihan Canggih Kantor	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Indeks kinerja peningkatan kemampuan kerja	4 Peningkatan	45.479.674	Kegiatan Peningkatan Pelatihan Canggih Kantor	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Indeks kinerja peningkatan kemampuan kerja	4 Peningkatan	45.479.674			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Kelembagaan gedung Kantor	1 Tahun	30.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Kelembagaan gedung Kantor	1 Tahun	30.000.000			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Pejabat	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Kelembagaan kendaraan dinas/pejabat	12 Bulan	150.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Pejabat	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Kelembagaan kendaraan dinas/pejabat	12 Bulan	150.000.000			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Kelembagaan peralatan kantor	5 Peningkatan	20.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Kelembagaan peralatan kantor	5 Peningkatan	20.000.000			
	Program Pencegahan Dini dan Pemenuhan Kebutuhan Bencana Alam			Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	75%	265.000.000	Program Pencegahan Dini dan Pemenuhan Kebutuhan Bencana Alam		Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	75%	265.000.000		
	Kegiatan Pelatihan Tim Reaksi Cepat	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Terlaksananya pelatihan Tim Reaksi Cepat	15 Orang	50.000.000	Kegiatan Pelatihan Tim Reaksi Cepat	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Terlaksananya pelatihan Tim Reaksi Cepat	15 Orang	50.000.000			
	Kegiatan Pembinaan Kelompok Siaga Bencana	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Terlaksananya pembinaan Siaga Bencana	4 Kelompok	140.000.000	Kegiatan Pembinaan Kelompok Siaga Bencana	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Terlaksananya pembinaan Siaga Bencana	4 Kelompok	140.000.000			
	Kegiatan Sosialisasi Bencana	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Terlaksananya sosialisasi bencana ke masyarakat daerah rawan bencana	500 Orang	45.000.000	Kegiatan Sosialisasi Bencana	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Terlaksananya sosialisasi bencana ke masyarakat daerah rawan bencana	500 Orang	45.000.000			
IV	Program Peningkatan Kelembagaan Menghadapi Bencana		Persentase bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana	80%	510.160.000	Program Peningkatan Kelembagaan Menghadapi Bencana		Persentase bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana	80%	510.160.000			
	Kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Berkelanjutan forum pengurangan risiko bencana	4 kali	30.000.000	Kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Berkelanjutan forum pengurangan risiko bencana	4 kali	30.000.000			
	Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Tersebutnya operasional informasi kewilayahan	1 Posko	105.160.000	Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Badan Penyelenggara Pemenuhan Fungsi Kantor	Tersebutnya operasional informasi kewilayahan	1 Posko	105.160.000			



Rencana Kerja PPBD Solok Selatan 2020

Rancangan Awal RRPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Kegiatan Perencanaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana	80	290.000.000	Kegiatan Perencanaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana	80	290.000.000	
	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	2 peralatan bencana (Perahu karet dan Keselamatan apertur)	65.000.000	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	3 peralatan bencana (Backhoe Loader Perahu Karet dan alat keselamatan apertur)	2.045.000.000	Pengadaan Backhoe Loader untuk penanganan bencana sebelum terjadinya dalam RRPD
V	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	80%	170.000.000	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	80%	170.000.000	
	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi infrastruktur pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase pendataan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	80%	170.000.000	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi infrastruktur pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase pendataan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	80%	170.000.000	
	JUMLAH				1.798.889.674					3.798.889.674	

II.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Adapun untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan Perda nomor 5 Tahun 2010, tentang SOTK BPBD yang urusannya mencakup :

1. Urusan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan aparatur dan masyarakat yang ada di daerah rawan bencana.

2. Urusan Kedaruratan dan Logistik yang menangani saat terjadinya bencana.

3. Urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang mengurus semua kegiatan pasca bencana.

Untuk menampung program dan kegiatan dari masyarakat, badan penanggulangan bencana daerah memperoleh dari :

1. Usulan dari musrenbang nagari dan kecamatan

2. Usulan dari masyarakat yang terdampak bencana di lokasi bencana

3. Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Sistem Nasional Penanggulangan Bencana.

Dari kegiatan Musrenbang yang diikuti di 7 Kecamatan maupun Musrenbang Kabupaten, maka tidak didapatkan usulan Kegiatan Prioritas dari Kecamatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten untuk dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2019. Namun untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap mengusulkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui anggaran APBN.





Tabel 11.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			NILAI		

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 - 2019, Program Penanggulangan bencana memiliki 7 Prioritas sebagai berikut :

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana
2. Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan
3. Peningkatan komitmen multi pihak dalam penanggulangan bencana
4. Pemenuhan tata kelola yang baik (Good Governance) bidang penanggulangan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Peningkatan kesiapsiagaan penanganan darurat bencana
7. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana

Dari 7 Prioritas Program penanggulangan bencana Nasional diatas maka Program Prioritas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana dengan telah diterbitkannya Perda nomor 4 Tahun 2010, Tentang Penanggulangan Bencana
2. Peningkatan komitmen multi pihak dalam penanggulangan bencana, dengan menjalin komunikasi dengan Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana.



5. Peningkatan kesiapsiagaan penanganan darurat bencana
- Dalam rangka mencapai prioritas ini, Tahun 2020 BPBD Kab. Solok Selatan mengkomodir berupa kegiatan :
- Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
 - Penanganan bencana
 - Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
 - Pelatihan penanggulangan bencana aparatur
 - Pengadaan peralatan keselamatan aparatur
 - Pembuatan dokumen penanggulangan bencana
 - Gladi kesiagaan terhadap bencana
4. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
- Dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, BPBD Kab. Solok Selatan dalam Rencana Anggaran Tahun 2020 telah mengkomodir berupa kegiatan:
- Pembinaan Kelompok Siaga Bencana
 - Sosialisasi Bencana
 - Pembersihan dan penelusuran hulu sungai
 - Pembentukan desa tangguh bencana
 - Pembinaan desa tangguh bencana
 - Forum pengurangan resiko bencana
 - Pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat
3. Pemenuhan tata kelola yang baik (Good Governance) bidang penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Solok Selatan telah melakukan kerjasama berupa Pendampingan pelaksanaan kegiatan darurat bencana dari Tim Pengawal dan Pengaman Perintah dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri Padang Aro dan Pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan Bencana di daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kebencanaan dituntut untuk melaksanakan fungsi pengelolaan kebencanaan mulai dari kebijakan Pra Bencana sampai dengan fungsi koordinasi saat terjadi dan pasca bencana. Untuk itu, disusun visi dan misi BPBD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021.VISI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan Bencana di daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kebencanaan dituntut untuk melaksanakan fungsi pengelolaan kebencanaan mulai dari kebijakan Pra Bencana sampai dengan fungsi koordinasi saat terjadi dan pasca bencana. Untuk itu, disusun visi dan misi BPBD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021.VISI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah :

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

- Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan Bencana di daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kebencanaan dituntut untuk melaksanakan fungsi pengelolaan kebencanaan mulai dari kebijakan Pra Bencana sampai dengan fungsi koordinasi saat terjadi dan pasca bencana. Untuk itu, disusun visi dan misi BPBD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021.VISI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah :
6. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana
- Prioritas ini tahun 2020 yang terakomodir dalam APBD Kab. Solok Selatan sebanyak 2 kegiatan yaitu :
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana
 - Survey dan pendataan kerusakan infrastruktur pasca bencana



“MEWUJUDKAN KESIAPAN MASYARAKAT SOLOK SELATAN DALAM MENGHADAPI BENCANA”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran BPBD. Tahun 2010 – 2015 misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi resiko bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana dan terpadu.
2. Menciptakan sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini menghadapi bencana di Kabupaten Solok Selatan.
3. Pengkajian dampak bencana secara cepat dan tepat serta penentuan status keadaan darurat bencana.
4. Merjalankan fungsi komando dan koordinasi serta melakukan kegiatan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
5. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital dalam kerangka pemulihan awal (early recovery).
6. Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat (DALA, HRNA dan PDNA).
7. Melakukan perencanaan, pengawasan dan mengkoordinir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan dampak bencana dalam segala aspek.
8. Mengintegrasikan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dan anggaran daerah.



9. Menyusun rencana penanggulangan bencana daerah, rencana aksi daerah, peta resiko bencana, kebijakan, prosedur dan standar yang dibutuhkan pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
- Jadi, dengan adanya Rencana Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan tersebut diatas akan lebih terkoordinasi dengan baik berdasarkan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya pada Renja OPD.



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH



Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan di APBD Tahun 2020 maka dibuatlah Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan dengan usulan anggaran Rp. 1.361.580.174 yang terdiri dari 4 Program dengan 20 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya setiap kegiatan dan prosedural administrasi yang ada, dengan anggaran sebesar Rp.494.460.000,- dengan kegiatan sbd:

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	65,860,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,600,000
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	24,000,000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	16,000,000
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	15,000,000
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Luar Daerah	250,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Kantor	72,000,000
Kegiatan Penyediaan Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	5,000,000



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Diharapkan nantinya dapat menunjang setiap kegiatan yang akan dilaksanakan aparat di BPBD dan dianggarkan sebesar Rp.334.429.674,- dengan kegiatan sbd:

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	89,000,000
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	45,429,674
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	30,000,000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	150,000,000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor	20,000,000

3. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana dengan anggaran sebesar Rp. 265.000.000,- dengan kegiatan-kegiatan sbd :

Kegiatan Pelatihan Tim Reaksi Cepat	50,000,000
Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Siaga Bencana	140,000,000
Kegiatan Sosialisasi Bencana	45,000,000
Kegiatan Forum pengurangan resiko bencana	30,000,000

4. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Sasaran kegiatan-kegiatan sbd :

Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	140,000,000
Kegiatan Penanganan bencana	280,000,000
Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	65,000,000



5. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Pagu Dana diperlukan sebesar Rp.170.000.000,- dengan kegiatan-kegiatan sbb :

Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana	170.000,000
--	-------------

Rencana Program dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020 sebagai berikut :

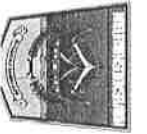


Rencana Kerja PPBD Solok Selatan 2020

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020 KABUPATEN SOLOK SELATAN

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	Usana/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Praktirraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keburutan Dana / Pagu Indikator	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Keburutan Dana / Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
1.19.03.01	Program/relayanan Administrasi Pemerintahan	Laksanakan Tugas Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	494,450,000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	12 Bulan	513,600,000
1.19.03.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Administrasi Surat Menyurat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	2.500,000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	12 Bulan	3.000,000
1.19.03.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	26.000,000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	12 Bulan	30.000,000
1.19.03.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	65.980,000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	12 Bulan	70.000,000
1.19.03.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	15.600,000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	12 Bulan	15.600,000
1.19.03.01	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	24.000,000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	12 Bulan	25.000,000
1.19.03.01	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Tersedianya Barang Cetak dan Pengiriman	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	16.000,000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	12 Bulan	20.000,000
1.19.03.01	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor	Tersedianya Bahan Untuk Peningkatan Bangunan Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	3.000,000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	12 Bulan	5.000,000
1.19.03.01	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	15.000,000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	12 Bulan	20.000,000
1.19.03.01	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan dan Luar Daerah	Terdiskusikannya Koordinasi dalam dan luar daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	250.000,000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	12 Bulan	250.000,000
1.19.03.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Kantor	Terdiskusikannya Jasa Pendukung Harian / THT selanjutnya 9 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	72.000,000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	12 Bulan	72.000,000



Rencana Kerja BPBD Solok Selatan 2020

KODE	Usuan/Bidang Usuan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Praktisan Maju Rencana Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 19 03 01 20	Kegiatan Penyelenggaraan Alat Kesehatan dan Bahan Pemrosesin	Kebersihan Rumah dan Peralatan Kesehatan Kantor	Buana	12 Bulan	4.500.000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	12 Bulan	3.000.000
1 19 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya Mobilitas Tugas Kantor	Buana	1 Unit	334.429.674	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	1 Unit	415.000.000
1 19 03 02 03	Kegiatan Peningkatan Gedung Kantor	Tertibnya Sarana bangunan gedung Kantor	Buana	1 Unit	89.000.000	APBD / DAU	Masuk dalam Renstra	1 Unit	
1 19 03 02 09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tertibnya Sarana bangunan gedung Kantor	Buana	4 Peralatan	45.429.674	APBD / DAU	Masuk dalam Renstra	3 Peralatan	35.000.000
1 19 03 02 22	Kegiatan Pemeliharaan Ruhn Berkala Gedung Kantor	Tertibnya Sarana bangunan gedung Kantor	Buana	1 Unit	30.000.000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	30.000.000
1 19 03 02 24	Kegiatan Pemeliharaan Ruhn Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tertibnya Sarana dinas/operasional 12 unit	Buana	12 Bulan	150.000.000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin Administrasi Kantor	12 Bulan	150.000.000
1 19 03 02 26	Kegiatan Pemeliharaan Ruhn Berkala Peralatan Kantor	Tertibnya Sarana Peralatan Kantor dan peralatan bencana	Buana	5 Peralatan	20.000.000	APBD / DAU	Kegiatan Rutin pemeliharaan alat kantor dan alat-alat kebencanaan	5 Peralatan	200.000.000
1 19 03 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Buana	75%	265.000.000	APBD / DAU	Masuk dalam Renstra	75%	225.000.000
1 19 03 22 17	Kegiatan Pelatihan Tim Reaksi Cepat	Tertibnya Sarana pelatihan Tim Reaksi Cepat	Buana	15 Orang	50.000.000	APBD / DAU	Masuk dalam Renstra	15 Orang	50.000.000
1 19 03 22 16	Kegiatan Pembinaan Kelompok Siaga Bencana	Tertibnya Sarana kelompok Siaga Bencana	Buana	4 Nagari	140.000.000	APBD / DAU	Masuk dalam Renstra	39 Nagari	100.000.000
1 19 03 22 18	Kegiatan Sosialisasi Bencana	Tertibnya Sarana sosialisasi simulasu bencana ke masyarakat (langsung, melalui radio dan papan informasi)	Buana	500 Orang	45.000.000	APBD / DAU	Masuk dalam Renstra	500 Orang	45.000.000



Rencana Kerja BPBD Solok Selatan 2020

KODE	Unsur/Bidang Unsur Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Praktirasan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 19 03 22	Kegiatan Forum pengurangan resiko bencana	Berlaluannya forum pengurangan resiko bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Forum PRB	30.000.000	APBD / DAU	Masuk dalam Renstra	1 Forum PRB	30.000.000
1 19 03 25	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Penertase bencana yang bisa dilangani sesuai standar kapasitas bencana		80%	485.000.000	APBD / DAU	Masuk dalam Renstra		430.000.000
1 19 03 25 01	Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Tersedianya Operasional informasi kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Posko	140.000.000	APBD / DAU	SPM Penanggulangan Bencana	1 Posko	130.000.000
1 19 03 25 02	Kegiatan Penaganan Bencana	Penertase bencana yang bisa dilangani sesuai standar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80	280.000.000	APBD / DAU	SPM Penanggulangan Bencana	80	250.000.000
1 19 03 25 03	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Tetelaksananya kapasitas bencana pengadsan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 peralatan bencana (Perahu karet)	65.000.000	APBD / DAU	SPM Penanggulangan Bencana	2 peralatan bencana	50.000.000
1 19 03 26	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Melungkartya pemuliharaan pasca bencana		80%	170.000.000	APBD / DAU	Masuk dalam Renstra	80%	50.000.000
1 19 03 26 01	Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana	Penertase pemuliharaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80%	170.000.000	APBD / DAU	Masuk dalam Renstra	80%	50.000.000
JUMLAH					1.748.889.674				1.633.600.000

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten SolokSelatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah **Program Tahunan** yang disesuaikan dengan Tupoksi yang dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan dan disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Tahun 2015-2019.

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

BAB V PENUTUP

